REFORMASI, KEBANGKITAN NASIONAL, DAN KEWASPADAAN NASIONAL

Pitu Sastra Wingarta


Sebelum membahas lebih jauh tentang Reformasi, Kebangkitan Nasional dan Kewaspadaan Nasional berikut korelasi antara variable masing-masing, ada baiknya kalau dimulai dengan memaknai kata-kata Nasional dalam kata Kebangkitan Nasional maupun Kewaspadaan Nasional. Kata-kata nasional tidak sekedar menunjukkan lingkup geografi seluruh tanah air wilayah Indonesia, tetapi ada makna yang lebih dari itu. Nasional di sini juga mengandung pemaknaan adanya konsep "nation" (nationalism) yang harus dipahami; konsep yang diperkenalkan oleh Ernest Renan dan Otto Bouer, lalu dirujuk oleh founding fathers Indonesia. Renan mengatakan bahwa yang disebut nation atau bangsa, tidak sekedar kumpulan orang-orang yang didasarkan karena adanya persamaan etnis, ras, agama dan bahkan bahasa. Bangsa atau nation menurut Renan adalah kumpulan orang-orang yang ingin meraih cita-cita dan tujuan yang dikehendaki bersama karena memiliki kesamaan jiwa (soul) tanpa peduli dan menghiraukan latar belakang etnis, agama, ras

---

1 Pitu Sastra Wingarta, Deputi Pendidikan Lemhannas RI

"...saya amat setuju sekali bahwa lembaga yang hari ini kita buka adalah Lembaga Pertahanan Nasional. Dan saya mengharap perkataan nasional di sini bukan diartikan, yah.. ini adalah pertahanan dari seluruh tanah air, seluruh natie, seluruh bangsa, tetapi hendaknya perkataan nasional di sini dipahami pula dalam arti mempergunakan, mendasarkan pertahanan kita itu betul-betul atas segenap konstalasi dan karakteristik dari pada natie kita sendiri. Tidak bisa dijiplak-jiplakkan". (Lemhannas-RI, 2007)

Secara substansi, Bung Karno memaknakan kata-kata Nasional di sini sebagai jati diri yang harus dipahami agar tidak mudah *menjiplak* yang mungkin saja tidak benar atau tidak sesuai dengan jati diri yang kita miliki untuk kepentingan membangun Bangsa dan Negara. Hal ini penting untuk pedoman dalam setiap melangkahkannya bangkit bangkit, melakukan reformasi dan waspadanya dalam menjalani kehidupan nasional kedepan; penting bagi sebuah reformasi, kebangkitan nasional dan kewaspadaan nasional serta penting untuk perpolitikan nasional kedepan.

Reformasi dan Kebangkitan Nasional (National Revivalism)

Kata-kata Reformasi tiba-tiba mencuat, lalu populer seiring dengan lahirnya suatu gerakan dari kesadaran dan kepedulian arah perjalanan bangsa dan negara dalam menjalankan kehidupan atau perpolitikan nasionalnya. Reformasi yang selanjutnya termaknakan sebagai penggal waktu atau era dengan istilah era reformasi dimulai di seputar tahun 1998 yang ditandai oleh suatu gerakan untuk kembali kekehidupan nasional yang sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945.

Era reformasi dalam kehidupan politik di Indonesia adalaha era perubahan yang ditandai
dengan pergantian rezim dari rezim orde baru ke rezim reformasi. Rezim orde baru sendiri lahir sebagai bentuk kehendak melakukan perubahan dari rezim sebelumnya yang disebut rezim orde lama. Setiap rezim akan selalu mencoba untuk mengklaim dan menawarkan suatu kehidupan politik yang disebut sistem politik yang terbaik untuk menuju dan menciptakan kebaikan bersama atau public good. Ramlan Surbakti, (1992) mengatakan; "rezim terbaik ialah kese- luruhan tata masyarakat, politik, ekonomi, sosial budaya, yang dianggap terbaik bagi negara-bangsa".

Orde Baru yang awal-awal kelahirannya di seputar tahun 1966, bertekad untuk menjalankan UUD 1945 secara murni dan konsekuennya ternyata melakukan berbagai penyimpangan-penyimpangan yang menjadikan kehidupan nasional lebih dikooptasi oleh filosofi kehidupan berideologi kapitalisme-liberalisme, maraknya korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan sistem pemerintahan yang sentralistik; kehidupan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila digunakan hanya sebatas jargon kekuasaan. Singkat kata, era reformasi adalah era koreksi akan deviasi politik nasional Indonesia yang dijalankan rezim Orde Baru. Sebenarnya saja dengan kelahiran Orde Baru yang pada awalnya merupakan bentuk koreksi jalannya politik nasional yang dijalankan oleh rezim Orde Lama, namun di tengah perjalanananya mengalami deviasi juga.

Pertanyaan generik muncul; adakah perjalanan politik nasional di era reformasi yang pada tahun 2008 ini berusia 10 tahun atau satu dasa warsa, masih pada relnya yang benar? Atau mungkin justru sudah semakin mengalami deviasi, semakin memurukkan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan, semakin melemahkan bargaining power-nya dalam percaturan politik global, selain capaian-capaianya terbaiknya pada bidang-bidang tertentu. Pertanyaan generik lain; apakah reformasi satu dasa warsa ini masih dimaknai sebagai masa transisi yang menjadikan era reformasi masih ter toleransikan gaduh, dengan berbagai kegagapan dan kagemangannya. Tatanan politik nasional yang lama terlanjur hancur lebur, tatanan politik nasional yang baru masih dicari-cari. Padahal Presiden SBY dalam berbagai kesempatan mengingatkan bahwa reformasi adalah change and continuity; yang tidak baik diubah, yang baik kita lestarikan keberlanjutannya.

Apabila era reformasi masih dimaknai sebagai masa transisi
politik nasional, apakah masa transisi harus dilakukan demikian lama sehingga harus membuktukan waktu sampai sepuluh tahun atau mungkin masih min- ta lebih. Transisi, adalah sebuah kenyataan dari tahapan proses, suatu penggal waktu yang diperlukan ketika adaptasi perubahan harus dilakukan. Lama dan cepatnya relatif, walau dalam konteks reformasi, semakin cepat semakin baik sehingga pembenuaran akan kegaduhan berlama-lama masa transisi dapat diakhiri. Sepuluh tahun sejak 1998 sampai 2008 adalah kurun waktu yang lebih dari cukup untuk melakukan transisi dari deviasi politik nasional masa orde baru, karena orde baru sendiri hanya butuh waktu lima tahun sejak 1966, melakukan transisi untuk menghasilkan frame work dan road map politik nasionalnya, yang dimulai dengan Pemilu 1971. Paling tidak sampai dengan dasa warsa 80-an, frame work dan road map itu masih dipatuhi oleh rezim orde baru, lalu mengalami perkembangan dan keluar jalur sampai dikoreksi melalui gerakan reformasi yang menjadikan rezim orde baru berakhir dan diganti oleh rezim baru; rezim reformasi.

Implementasi reformasi selama sepuluh tahun terakhir, di balik keberhasilan yang dicapainya, lebih ditandai dengan demokratisasi, pergerakan peran aktor politik dalam sistem perpolitikan nasional. Kebijakan publik yang awalnya menjadi domain pusat bergeser manjadi domain daerah. Top down bergeser menjadi bottom up; yang di-dominasi aktor politik partai politik, pengusaha dan LSM, serta supremasi negara yang bergeser kemekanisme pasar. Hasilnya; era reformasi yang tertoleransi sebagai masa transisi yang sudah sepuluh tahun ini, dirasakan sebagai sebuah kerja besar yang melelahkan, menguras tenaga, ekonomi biaya tinggi dan penuh kegaduhan, potensi maupun manivest merusak kultur dan tatanan sosial masyarakat serta merusak perpolitikan nasional menurut amanat pembukaan UUD 1945.

Nasionalisme Indonesia mengalami degradasi karena primordialisme, nasionalisme etnisitas, radikalisme dan anarkisme seolah-olah memperoleh tempat dalam sistem perpolitikan nasional era reformasi ini. Kondisi seperti ini seharusnya disadari dan diwaspadai oleh setiap anak bangsa. Diperlukan gerakan nasional penyadaran diri (to revive); dan to be aware, lalu bangkit dan keluar dari kegaduhan itu. Momentum itu harus segera diambil sebelum terpuruk lebih dalam karena toleransinya yang terlalu lama. Toleransi itu harus diakhiri
dengan melakukan konsolidasi agar bisa memilih dan memilih yang mana baik dan mana yang tidak baik, mana yang sudah harus dibuang, yang mana masih diperlukan namun diubah, dan mana yang harus terus dilesetarikan. Ini yang harus kita lakukan pada seratus tahun kebangkitan nasional agar kegaduhan di era reformasi tidak menjadi bola liar dalam sistem politik nasional dan mengancam integrasi nasional.

Kalau kali ini kita bicara masalah kebangkitan nasional, bertanat kita akan bicara masalah kebangkitan nasionalisme dan bicara masalah kebangkitan menggunakan kekuatan konstelasi dan karakteristik dari Bangsa sendiri. Artinya; kebangkitan yang didasarkan pada kesadaran dan pemahaman akan kemampuan, kekuatan yang kita miliki. Siapa diri kita, dari mana asal kita, bagaimana mentalitas kita, kultur kita, peradaban kita jati diri kita dan sebagainya, untuk menghindari asal jiplak yang belum tentu sesuai dengan karakter yang kita miliki. Kebangkitan yang rasional dari hasil hitung-hitungan akurat tentang siapa diri kita, siapa musuh kita, dan seperti apa lingkungan bernamanya. Tsum Zu ahli strategi pada jamannya mengatakan: "ketahui dirimu, ketahui musuhmu, seribu kali perang, seribu kali akan menang". Ini yang kita jadikan pedoman bila bangkit dan melangkah.

Apabila (gerakan) Budi Oetomo tahun 1908 dan (gerakan) Sumpah Pemuda tahun 1928 yang sering dikatakan sebagai Kebangkitan Nasional II dulu hanya mampu menghasilkan kesadaran dan pemahaman tentang makna nasionalisme sebagai tuntutan hak sebagai "kami" dari "mereka" yang penindas dan penjajah, namun secara pisik belum mampu mewujudkan dalam sebuah Negara Kebangsaan (nation state) Indonesia seperti yang diidam-idamkan, Negara Kebangsaan yang mendeja yang ingin meraih cita-citanya sendiri berdasarkan jati diri "kami" yang dimiliki dan tidak berdasarkan jati diri "merek" yang penindas dan penjajah. Baru pada tanggal 17 Agustus 1945 hal itu dapat dwujudkan. Founding Father kita sadar bahwa hanya dengan nation state yang mendeja cita-cita itu dapat diraih. The classic style penindas dan penjajah yang menggunakan ideologi kolonialisme dan imperialisme berakhir dengan kebangkitan the new style yang menempatkan hak setiap bangsa menentukan nasibnya sendiri dalam perkampungan dunia yang majemuk multi kultur.

Kebangkitan atau revival
harus dimaknai sebagai ke-
bangunan baru (revival of the clas-
sic style) yang menuntut nilai-
nilai praksis yang baru dari nilai
intrinsic nasionalisme itu. Ke-
bangkitan baru politik nasional
menyangkut ideologi, aktor poli-
tik, konstitusi dan demokrasi
dalam bingkai nasionalisme. Hal
yang mendasar dari nilai intrin-
sic nasionalisme Indonesia adalah
kesepakatan untuk tetap dalam
satu jiwa sesuai nilai-nilai luur
yang terkandung dalam ideolo-
igi Pancasila. Pancasila yang di-
sepakati Bangsa Indonesia untuk
merekatkan jiwanya sebagai
kumpulan orang-orang yang ber
ke Tuhanan, orang-orang yang
menjunjung tinggi kemanusiaan
yang adil dan beradab, orang-
orang yang mendambakan per-
satuan Indonesia, orang-orang
yang demokratis dengan sistem
kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam per-
musyawaratan/perwakilan, ser-
ta kumpulan orang-orang yang
menghendaki suatu keadilan so-
sial bagi seluruh rakyat Indone-
sia. Kebangkitan kumpulan orang-
orang yang bersepakat dalam
satu jiwa, menjunjung tinggi
pluralisme, senasib sepennang-
gunan, anti penjajahan dan
penindasan dalam berbagai ben-
tuknya, dan yang lebih penting
lagi anti pengkhianatan, karena
sejak awal terbentuknya nasio-
nalisme Indonesia tidak memberi
tempat pada kaum penghianat
bangsa yang sering mengabaikan
moral dan etika untuk kepen-
tingan meraih sesuatu. Kebang-
kitan nasional Indonesia adalah
kebangkitan nasionalismenya In-
donesia yang bercirikan dan ber-
jadi diri pluralisme dan kekuatan
moral. Bhineka Tunggal Ikat an
hana dharma mangrua; berbeda
itu sejatinya satu, yang satu itu
adalah kebenaran, dan tidak ada
kebenaran yang mendua. Jati
diri nasionalisme seperti ini tidak
akan bertahan bila moral sudah
dikesampingkan. Kehancuran
dan ketercabikannya hanya ting-
gal menunggu waktu bila moral
sudah tidak lagi memperoleh
tempat. Terlebih-lebih meng-
hadapi kekuatan energinya glo-
balisasi yang mengandalkan ra-
sio menghalalkan segala cara
dengan logika-logika hukum ma-
teril yang dibangunnya. Karena
alasan moral dan etikalah na-
sionalisme Indonesia terpuruk,
nasionalisme Indonesia tergadai,
nasionalisme Indonesia tercabik-
cabik, nasionalisme Indonesia
sudah tidak lagi dalam satu jiwa,
nasionalisme Indonesia tidak lagi
senasib sepennanggungan, na-
sionalisme Indonesia yang meng-
alami kesenjangan dalam ber-
bagai aspek kehidupan.

Roh nasionalisme Indonesia
terletak pada ideologi pluralisme
dan moralnya. Bila roh itu sudah
hilang, nasionalisme Indonesia
hanya tinggal simbol-simbol semata yang tidak lagi memiliki makna dan nilai. Sistem politik yang dibangun dalam bingkai nasionalisme sudah tidak lagi ada maknanya kalau moral dan etika sudah ditinggalkan. Moral dan etika para aktor politik. Apabila politik itu mengenyampingkan moral seperti yang diungkapkan oleh Machiavelli bahwa; "... a political worldview which described practical methods for an absolute ruler to attain and maintain political power. There is no moral basis on which to judge the difference between legitimate and illegitimate uses of power,"

bukan berarti hal itu harus ditoleransikan, karena politik yang meninggalkan dan menanggalkan moral itulah yang sejatinya manjadi substansi sasaran reformasi, areal yang harus ditinggalkan serta menjadi stand point untuk bangkit (to revive) dalam melakukan kebangkitan (politik) nasional. 


Kebangunan baru (revival of the classic style) menuntut nilai praksis yang sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis dan fenomenanya. Ada tuntutan terhadap Bangsa dan Penyelelanggara Negara untuk mampu membaca tanda-tanda jaman. Dalam hal ini Kepemimpinan Nasional menjadi signifikan, karena struktur teknik masyarakat di era reformasi yang berkaitan dengan sistem hukum nasional masih jauh dari yang diharapkan. Kepemimpinan nasional yang dituntut adalah kepemimpinan nasional yang visioner dan berkualitas kenegarawanan. Kepemimpinan yang berpikir, bersikap dan bertindak sebagai


Kewaspadaan Nasional terhadap Ancaman

Secara substansi Kewaspadaan Nasional adalah suatu sikap dalam hubungannya dengan menjaga dan memelihara nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaranya dari suatu ancaman. Kewaspadaan nasional juga sebagai suatu kualitas ke-siapan dan kesiagaan yang harus dimiliki olah bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI. Kewaspadaan nasional dapat juga diartikan sebagai manifestasi kepedulian dan rasa tanggung jawab bangsa Indonesia terhadap keselamatan dan keutuhan bangsa/NKRI. Oleh karena itu kewaspadaan nasional harus bertasik dari keyakinan ideologis dan nasionalisme yang kuku h serta perlu didukung oleh usaha-usaha peman-tauan sejak dini dan terus menerus terhadap berbagai implikasi dari situasi serta kondisi yang berkembang baik di dalam maupun di luar negeri (Lemhannas-RI, 2006).

Pertanyaannya adalah; bagaimana mengimplementasikan bentuk konkret sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme, bentuk kesiapan dan kesiagaan dalam mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan pencegahan berbagai bentuk dan sifat ancaman terhadap NKRI, sehingga kesemua nya itu mencerminkan bentuk kepedu-
lian dan rasa tanggung jawab bangsa Indonesia terhadap kese- 
lamatan dan keutuhan bangsa/ 

NKRI.

Implementasi adalah lang-
kah-langkah konsepsional yang 
mengandung kebijakan yang 
harus ditempuh, pilihan strategi 
yang tepat serta program konkrit 
Aplikatif yang harus dilakukan 
dalam menghadapi ancaman 
potensial maupun manifest. Bent-
tuk konkritnya; implementasi 
bela negara, karena bela negara 
adelah; cinta tanah air, memii-
lik fi kesadaran dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara, yakin 
akan Pancasila sebagai ideologi 
negara, serta memiliki sikap dan 
berdampak yang mencerminkan 
kerelaan untuk berkorban untuk 
bangsa & negara (http://bela-
negara.dephan.go.id/). Kese-
mma ini adalah sesuatu yang sa-
gat dibutuhkan oleh kewasa-

daan nasional dalam meng-
hadapi ancaman.

Tentang ancaman; diartikan 
sebagai sebuah kondisi, tin-
dakan, potensi, baik alamiah 
atu hasil suatu rekayasa, ber-
bentuk pisik atau non pisik, be-
rasal dari dalam atau luar negeri, 
secara langsung atau tidak langs-
sung diperkirakan atau diduga 
atu yang sudah nyata yang da-
pat membahayakan tatanan ser-
ta kelangsungan hidup bangsa 
dan negara dalam rangka pen-
capaian tujuan nasionalnya. An-
caman itu sendiri dapat berasal 
dari luar maupun dalam negeri. 
Kedua-duanya selalu memiliki 
keterkaitan dan saling mempe-
ngaruhi sehingga sulit untuk da-
pat dipisahkan. Ancaman (ke-
amanan) tradisional yang da-
tangnya dari luar negeri adalah 
invasi atau agresi dari negara 
lain. Berdasarkan perkiraan, an-
caman dalam bentuk ini kecil 
lebih mempunyikannya. Oleh karena 
itu perkiraan ancaman yang le-
bih mempunyikannya adalah an-
caman non tradisional (non tra-
ditional threat) yaitu setiap aksi 
yang mengancam kedaulatan 
negara, keutuhan wilayah, ser-
ta keselamatan bangsa dan nega-
ra kesatuan RI; ancaman terha-
dap wawasan nusantara. Wa-
wasan Nusantara adalah wa-
wasan Nasional Indonesia, yaitu 
cara pandang Bangsa Indonesia 
berlandaskan Pancasila dan 
UUD 1945 tentang diri dan ling-
kungannya di dalam eksistensi-
nya yang serba Nusantara di 
dalam mengekspresikan diri di 
tengah-tengah lingkungan na-
sionalnya (Lemhannas-RI). An-
caman yang paling mungkin 
dari luar negeri terhadap Indo-
nesia adalah kejahatan yang ter-
organisir yang dilakukan oleh 
aktor-aktor non negara untuk 
memperoleh keuntungan de-
ngan memanipulasi kondisi da-
lam negeri dan keterbatasan apa-
ratur pemerintah.
Permasalahan Kontemporer Bangsa dan Negara


sudah dirasakan, karena di-
akhirinya konflik bersonjata an-
tara pemerintah dengan GAM
melalui redaya MoU Helsinki,
namun masa depan Aceh dalam
pangkuan NKRI bagi sebagian
masyarakat Indonesia masih
banyak yang meragukan. Indi-
kator keinginan beberapa kabu-
paten di Provinsi NAD yang me-
nuntut pemekaran provinsi dari
provinsi induknya adalah indi-
kator masih rawannya keaman-
an Provinsi NAD. Kabupaten-
kabupaten di bagian barat dan
selatan provinsi NAD menuntut
memisahkan diri dari NAD men-
jadi Provinsi Aceh Barat Selatan
(ABAS), begitu juga beberapa
kabupaten di bagian tengah dan
tenggara NAD menuntut memi-
sahkan diri dari NAD menjadi
provinsi Aceh Leuser Antara
(ALA). Motivasinya, mereka ti-
dak bersedia disatukan dalam
satu wadah di bawah kepemim-
pinan pimpinan daerah yang
ada sekarang ini.

Gangguan terhadap keter-
tiban publik seperti terror, kon-
flik komunal yang berlatar bela-
kang primordialis (etnis, agama),
radikalisme, kerusuhan atau
pembangkangan masal, perda-
gangan narkoba, perjudian dan
kejahatan lainnya yang tidak di-
tangani dengan tepat dapat
akan meningkat dan berkem-
bang menjadi ancaman ter-
hadap keamanan nasional. Situ-
asi ini akan diperkirakan ber-
langsung dalam waktu menda-
tang.( Departemen Pertahanan
RI, 2005). Kondisi politik nasio-
nal Indonesia yang digambarkan
ini sangat merugikan Indonesia
dalam melakukan hubungan in-
ternasionalnya menyungkut
pembangunan ekonomi, citra
dan power untuk dibargaining-
kan dalam percaturan global.

Menyungkut masalah Ideolo-
gi Bangsa. Presiden SBY dalam
pidatonya pada peringatan hari
lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni
2006 mengatakan;

" dalam delapan tahun terakhir
ini, di tengah-tengah gerak refor-
masi dan demokratisasi yang ber-
langsung di negeri kita, terkadang
kita kurang berani , kita menahan
diri, untuk mengucapkan kata-
kata semacam Pancasila, Undang-
Undang Dasar 1945, NKRI, Bhine-
ka Tunggal Ika, Wawasan Kebang-
saan, Stabilitas, Pembangunan, Ke-
majemukan dan lain-lain. Karena
bisa-bisa dianggap tidak sejalan
dengan gerak reformasi dan de-
mokratisasi. Bisa-bisa dianggap
tidak reformis".

Pidato ini merupakan repre-
sentatif dari sebuah kesadaran
bahtu di era reformasi yang
ditandai dengan demokratisasi
justru kehidupan politik nasion-
al Indonesia semakin menjauh
dari nilai-nilai luhur yang ter-
kandung dalam Pancasila. Pada-
hal Pancasila adalah ideologi
negara yang konstitusional.
Artinya sekali pun Tap MPR RI
No. XVIII/MPR/1998 mencabut

Tentang ideologi Pancasila, As’ad Said Ali (2007) mengatakan bahwa:


Permasalahan-permasalahan kontemporer lain yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan kita; wawasan nusantara, Prof. Muladi mengidentifikasi secara nasional bahaya-bahaya yang mengancam Wawasan Nusantara dalam arti fisik dan sosial antara lain (Muladi, 2007):

- Belum seluruh negara meratifikasi UNCLOS 1982 (contoh AS dalam kasus Bawean).
- Belum adanya UU yang mengatur wilayah dengan batas-batas dan hak-haknya sebagaimana diamanatkan oleh pasal 25 A UUD 1945.
- Lemahnya "effektive occupation" mengingat banyaknya pulau dan luasnya wilayah, serta terbatasnya sumber daya, sarana dan SDM.
- Ikatan premordial yang semakin menajam akibat Globalisasi dan bagi yang tidak dapat menyesuaikan diri akan mencari "traditional shelter".
- Keberadaan 17.000 pulau lebih di samping merupakan asset nasional, juga mengandung kerawanan mengingat koridor untuk masuk ke wilayah nasional tak terhitung.
- Dampak multi dimensional Globalisasi dengan meningkatnya ICT Technology, sehingga sulit mengontrol pengaruh budaya, ideas/ideology, manusia, informasi melewati batas wilayah negara yang tidak jarak berseberangan dengan kepribadian bangsa.
- Bahaya-bahaya yang diakibatkan oleh "non traditional/non military security threat" seperti kejahatan transnational terorganisasi (perdagangan senjata api, imigran gelap, narkotika, money laundering,illegal fishing, illegal logging,illegal mining, campur tangan elemen-elemen asing dalam gerakan separatism,terorisme yang dimotori oleh radikalisme yang bersifat transnasional, pembuangan limbah beracun/B3, penyakit menular, konflik horizontal yang tidak jarang mengundang solidaritas kelompok-kelompok asing dan lain-lain).
- Partisipasi dan kesadaran nasional masyarakat di perbatasan yang lemah akibat kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan.
- Kordinasi pemerintah pusat dan daerah yang masih perlu ditingkatkan.
- Otonomi daerah yang sering ditafsirkan sebagai pembagian kekuasaan.
- Kuantitas penduduk yang belum diimbangi dengan kualitas SDM.
- Belum berkembangnya alternatif energi yang terbarukan.
- Melemahnya kesadaran terhadap ideologi bangsa dan karakter nasional lainnya.
- Iklim investasi yang kurang atraktif.
- Ikatan primordial yang yang menonjol kembali.
- Penegakan supremasi hukum yang belum memuaskan.
- Partai-partai politik yang belum melaksanakan perannya dengan baik sesuai dengan Undang-Undang.
- Implikasi pemisahan fungsi pertahanan dan fungsi keamanan yang bersifat dikotomis dengan segala implikasinya.
- Berkembangnya doktrin "pre-emptive strike" atau "anticipa-
tory self defence" setelah peristiwa 9/11.

- Analisis kecenderungan Global sampai 2015 yang cukup memprihatinkan, baik yang berkaitan dengan aspek demografi, kekayaan alam dan lingkungan, sain dan teknologi, ekonomi global dan globalisasi, kepemeringan nasional dan internasional, konflik mendatang maupun peranan negara-negara maju.

Di era reformasi, begitu banyak permasalahan di daerah yang membutuhkan perhatian serius dan sungguh-sungguh sejak reformasi bergulir yang menghasilkan bergeraknya peran pusat kedaerah sebagai bentuk perubahan pemerintahan yang sentralistik menjadi pemerintahan yang desentralistik yang memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah. Dalam suatu kesempatan Presiden SBY sudah mengingatkan bahwa

"Dalam alam reformasi ini, untuk kepentingan yang benar, kita melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah. Tapi pahami betul, proses yang penting ini tidak boleh menggoyangkan sendi-sendi NKRI, sendi-sendi Kebangsaan, karena bisa mengoyakkan kerangka bernegara kita. Desentralisasi dan otonomi daerah pilihan, ketika di masa lalu terasa pemberdayaan ini kurang merata, kurang adil, sentralistik dan konsentrik, kita bedah, kita lakukan pemberdayaan dan kita perbaiki sistem pemerintahan seperti ini. Namun sekali lagi jangan sampai ikatan kesukuan, ikatan keagamaan, ikatan etnis, ikatan kedaerahan dan lain-lain menabrak ikatan kebangsaan yang harus kokoh kita pertahankan."

Penyampaian Presiden SBY seperti di atas, adalah penyampaian yang menggambarkan adanya sebuah realita bahwa otonomi daerah masih menyimpan berbagai permasalahan di berbagai aspek. Walau demikian, tatap muka Presiden SBY dengan para bupati, walikota, dan ketua DPRD kabupaten/kota, pada tanggal 8 April 2008, para bupati, walikota dan ketua DPRD kabupaten/kota berkomenten bahwa; "tonomi daerah tetap menjadi sebuah kebutuhan dan integrasi nasional tetap juga menjadi sebuah keniscayaan".

Begitu banyak di era reformasi ini Indonesia menghadapi permasalahan. Belum lagi masalah masalah bencana alam, masalah kebutuhan pangan, energi dan masalah perekonomian lainnya. Berangkat dari kesadaran akan kondisi inilah seharusnya Indonesia bangkit dan bangun dengan tidak henti-hentinya mencoba dan menemukan nilai-nilai praksis yang baru yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup Bangsa dan Negara ini dalam wadah NKRI dari Sabang sampai Merauke dalam bingkai Kewaspadaan Nasional untuk kepentingan Ke-

Jurnal Ketahanan Nasional, XIII (2), April 2008
Penutup

Pada tanggal 20 Mei 2008, tepat seratus tahun hari kebangkitan nasional. Tahun 2008 juga menjadi tahun kesepuluh atau satu dasa warsa era reformasi. Kebangkitan nasional yang secara substansi merupakan bentuk penyadaran nasional dari sebuah nasionalisme yang diartikan sebagai bentuk penyadaran satu jiwa dari kumpulan bangsa-bangsa pra-nasional yang memiliki jati diri bhineka tunggal ika – tan hana dharma mangrua, untuk menjadi bangsa yang satu; bangsa Indonesia, berbahasa satu; bahasa Indonesia; bertanah air satu; tanah air Indonesia dalam wadah NKRI dari Sabang sampai Merauke berdasar Pancasila dan UUD 1945, yang menjunjung tinggi kemulti kulturalnya dan pluralisme.

Kewaspadaan Nasional yang diartikan sebagai sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme, untuk perduli dengan kelangsungan kehidupan politik nasional dari faktor ancaman, dipraktekkan dalam (gerakan) reformasi untuk melakukan koreksi dan menghentikan praktek-praktek deviasi jahannya politik nasional yang menyimpang dari amanat pembukaan UUD 1945.

Walau era reformasi menjadi sebuah bentuk implementasi kewaspadaan nasional, namun secara empiris dalam perjalanan sepuluh tahunnya sejak 1998, bukannya steril dari berbagai permasalahan, kesalahan dan deviasi. Oleh karenanya, melalui kewaspadaan nasional juga yang diartikan sebagai bentuk sikap kesiapan dan kesiagaan bangsa dalam melakukan deteksi dini, peringatan dini, pencegahan dini, penangkalan dini dan tanggap awal menghadapi ancaman yang akan membahayakan kelangsungan kehidupan nasional, reformasi sepantasnya dikritisi melalui penyadaran nasional.

Reformasi tidak boleh menjadi bentuk kewaspadaan yang sudah tidak lagi waspada, reformasi tidak boleh menjadi sapu pembersih yang tidak lagi bersih, reformasi tidak boleh menjadi alat koreksi yang tidak boleh dikoreksi. Untuk itu reformasi perlu dikonsolidasikan, dan untuk itu reformasi disadarkan melalui penyadaran nasional atau kebangkitan nasional (national revival). Pada tahun 2008 di saat kebangkitan nasional kita peringati 100 tahun dan reformasi kita peringati 10 tahun, inilah momentum yang harus kita ambil dan gunakan, untuk menemukan konsep cerdas bagaimana menjalankan politik nasional yang menjamin kebaikan bersama. Melalui kewaspadaan nasional yang terukur dan reformasi yang dikonsolidasikan, maka
kebangkitan nasional dengan (gerakan) penyaluran nasional akan jati diri bangsa yang *bhinneka tunggal ika-tan hana dharma mangrua*, konsep cerdas berbasis moral dan etika akan ditemukan untuk kehidupan bersama yang baik (*public good*) dalam wadah NKRI berdasar Pancasila dan UUD 1945. Inilah masa depan Indonesia yang diharapkan.

**Bahan Bacaan**


Departemen Pertahanan RI, 2005


Lemhanas-RI,2003 Buku Induk Wawasan Nusantara


http://belanegara.dephan.go.id